

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengimplementasikan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah (Suryahadi & Santosa, 2024). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten dan kota menciptakan peluang untuk mengatur dan mengelola secara mandiri sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Peluang pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber dana, sumber daya manusia dan sumber daya lain lebih besar diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota dengan pelaksanaan otonomi daerah. Optimalisasi potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan maupun pembiayaan pada pembangunan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kekayaan alam beragam dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan potensi ekonomi, yaitu bersumber dari sektor pariwisata hingga sektor pertanian. Prinsip pengelolaan keuangan diimplementasikan oleh Kabupaten Temanggung melalui data realisasi pendapatan dan belanja yang akan memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggungjawabnya, yaitu kemampuan membiayai pelaksanaan tugas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2019-2023:

Tabel 1. PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019-2023

<i>Tahun</i>	<i>PAD</i>	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	<i>Belanja Daerah</i>
2019	278.313.775.793	1.530.401.293.306	69.668.754.583	1.841.033.635.270
2020	307.488.084.365	1.451.581.978.982	71.778.390.000	1.783.204.949.098
2021	363.128.342.571	1.537.846.595.458	70.031.052.000	1.877.969.167.294
2022	308.705.886.109	1.585.778.027.969	1.000.000.000	1.958.748.409.806
2023	350.283.014.437	1.653.587.318.227		2.042.295.812.083

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai penilaian kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Salah satu parameter tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dapat diukur menggunakan proporsi tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wahyuni & Arief, 2020). Korelasi besaran nilai kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat bersifat negatif. Artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah, dan sebaliknya, semakin kecil Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru semakin besar tingkat ketergantungan daerah pada pusat (Prakoso et al., 2019). Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih kecil, yaitu menduduki posisi kedua dalam komponen pendapatan. Urutan kontribusi dari yang terbesar hingga terkecil dalam komponen pendapatan untuk membiayai seluruh Belanja Daerah yaitu Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 2. Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019-2023

<i>Tahun</i>	<i>PAD</i>	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>Total Pendapatan</i>	<i>Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan (%)</i>	<i>Rasio Kemandirian (%)</i>
2019	278.313.775.793	1.530.401.293.306	1.878.383.823.682	14,82	18,19
2020	307.488.084.365	1.451.581.978.982	1.830.848.453.347	16,79	21,18
2021	363.128.342.571	1.537.846.595.458	1.971.005.990.029	18,42	23,61
2022	308.705.886.109	1.585.778.027.969	1.895.483.914.078	16,29	19,47
2023	350.283.014.437	1.653.587.318.227	2.003.870.332.664	17,48	21,18

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah masih lebih rendah daripada realisasi pendapatan transfer, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dioptimalkan agar dapat membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun anggaran 2019-2023, besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Temanggung belum mampu menciptakan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung terhadap total pendapatan daerah dan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Temanggung. Selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun anggaran 2019-2023, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Temanggung masih dibawah 25 (dua puluh lima) persen atau merupakan pola hubungan instruktif. Halim (2019) mengemukakan, hubungan instruktif terjadi jika peranan pemerintah pusat lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah.

Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat menyebabkan persepsi masyarakat bahwa pemerintah daerah menghadapi kendala dalam mengembangkan potensi lokal, sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer yang diterima (Haryu & Sinurat, 2024). Sebagai salah satu penghasil kopi dan

tembakau terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung berpotensi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari sektor pertanian asalkan dikelola dengan baik. Selain itu, potensi dari sektor pariwisata juga dapat dimaksimalkan. Pemerintah harus menetapkan strategi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu sumber daya alam, manusia dan pemanfaatan teknologi, sehingga potensi yang ada dapat direalisasikan menjadi pendapatan riil.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023), Fahriza & Riswati (2023), Kushariyadi (2023), Yudia et al. (2024), dan Tejaarif & Husni (2025). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berbeda-beda, dimana beberapa daerah masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Masalah kemandirian keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Murana (2016) menunjukkan bahwa pemerintah lokal di Nigeria juga menghadapi tantangan serupa. Hasil yang diperoleh dari analisis menunjukkan bahwa transfer keuangan dari pemerintah federal (*Statutory Federal Allocation*) adalah sumber pendapatan pemerintah lokal yang paling dapat diandalkan, bahkan belanja modal tidak dapat dilaksanakan tanpa sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pendanaan dari alokasi federal, Pemerintah Daerah Nigeria dituntut agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan sumber pendapatan internal, terutama pada sektor yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi & Santosa (2024), menyebutkan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 16 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2018-2022 memiliki rasio kemandirian keuangan pada kategori rendah sekali.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk melakukan analisis menyeluruh terkait kemandirian keuangan daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Analisis tersebut akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kemandirian keuangan dan upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memiliki kemandirian keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Pemerintah Kabupaten Temanggung menghadapi tantangan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, meskipun memiliki potensi sumber daya yang alam yang melimpah, sehingga rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, dan ketergantungan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat masih tinggi. Permasalahan ini mendorong peneliti untuk mengeksplorasi beberapa aspek, yaitu (i) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung? (ii) strategi apa yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, (ii) menganalisis strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah (i) penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang kemandirian keuangan daerah untuk publik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, (ii) hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang kemandirian keuangan daerah.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemandirian keuangan daerah dan pemahaman mendalam mengenai potensi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Grand Theory*

Grand theory pada penelitian ini yaitu *stewardship theory* yang merupakan bagian dari *agency theory*. *Stewardship theory* yaitu teori yang memberikan gambaran situasi bahwa tujuan kinerja para manajer adalah untuk dapat mencapai sasaran kepentingan organisasi, bukan untuk tujuan-tujuan individu. *Stewardship theory* merancang para eksekutif yang dalam hal ini bertindak sebagai *steward* agar mempunyai dasar sosiologi dan psikologi sehingga memiliki motivasi untuk memberikan kinerja terbaik demi mencapai sasaran organisasi. Diharapkan *steward* untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, yaitu tetap berada dalam organisasinya (Donaldson & Davis, 1991). Implikasi teori dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Temanggung bertindak sebagai *steward* atau Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki peran krusial dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah.

2.1.2 Otonomi Daerah

Sistem desentralisasi diimplementasikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri, sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri, dan menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah, dengan harapan kesejahteraan daerah dapat meningkat (Khusaini, 2018).

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Di era globalisasi, pemberian wewenang otonomi kepada daerah merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna membagi kekuasaan dengan cara mendistribusikan pendapatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Halim & Kusufi dalam Arpani & Halmawati (2020) mendefinisikan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Sedangkan menurut Yoda & Febriani (2019), kemandirian keuangan daerah diukur dengan perbandingan antara nilai PAD dan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pinjaman.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pembangunan, dan menangani urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) diukur dengan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer atau sumber penerimaan lain. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah (Halim, 2012).

Rumus rasio kemandirian keuangan daerah:

$$RKDD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

(1)

Menurut Halim (2019) dikemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu (i) pola hubungan instruktif, menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, (ii) pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, dan daerah mulai mampu untuk melaksanakan otonomi, (iii) pola hubungan partisipatif, ditandai dengan berkurangnya peran pemerintah pusat, karena tingkat kemandirian daerah lebih besar kontribusinya untuk membiayai urusan otonomi daerah, (iv) pola hubungan delegatif, situasi dimana sudah tidak ada campur tangan pemerintah pusat, karena daerah telah sepenuhnya mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Kemampuan keuangan, rasio kemandirian keuangan, serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kemampuan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Kriteria Pola Hubungan

<i>Kemampuan Keuangan</i>	<i>Rasio Kemandirian %</i>	<i>Pola Hubungan</i>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	> 25 - 50	Konsultatif
Sedang	> 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

Diberikannya kemandirian kepada daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas dan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa tekanan dari pihak lain untuk memperkokoh perekonomian nasional (Syam & Zulfikar, 2022). Setiap daerah di Indonesia, diharapkan mampu untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, dibuktikan dengan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah untuk mendanai seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yaitu berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan (Kushariyadi, 2023).

2.1.5 Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah

Halim dalam Ardiansyah (2023) memaparkan ciri-ciri suatu daerah telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan otonomi adalah kemampuan dalam

pengelolaan keuangan daerah, artinya pemerintah daerah harus menetapkan strategi agar dapat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Menurut Lawrence & W F Glueck (2019), strategi adalah penyatuan rencana yang terpadu dan menyeluruh untuk memastikan pencapaian tujuan utama organisasi dengan menghubungkan keunggulan organisasi dan tantangan dari lingkungan yang dirancang melalui pelaksanaan oleh organisasi dengan cara yang tepat. Sumber keuangan daerah yang ada harus digali dan dioptimalkan, selanjutnya sumber daya tersebut dikelola dan digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dapat berkurang (Ardiansyah, 2023).

Perbaikan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, penciptaan peluang lapangan kerja baru dapat terwujud seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang semakin memperbesar potensi kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan suatu daerah (Suryahadi & Santosa, 2024). Peningkatan kemandirian keuangan daerah, khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Strategi yang komprehensif perlu diterapkan dengan melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu difokuskan pada optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup tiga aspek utama, yaitu (i) penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah, (ii) peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia petugas pajak dan retribusi daerah, (iii) peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan di berbagai daerah di Indonesia pada periode waktu yang berbeda pula. Hasil Penelitian sebelumnya beragam sesuai kondisi pemerintah daerah masing-masing. Penelitian terdahulu menjadi bahan masukan penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu objek penelitian adalah kemandirian keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah lokasi penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan aspek yang diteliti berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab kemandirian keuangan yang rendah dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan, sedangkan pada penelitian sebelumnya, berfokus pada analisa rasio kemandirian keuangan.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kemandirian keuangan daerah:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

<i>No</i>	<i>Penulis (Tahun)</i>	<i>Judul</i>	<i>Teknik Analisis</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
1	Murana (2016)	<i>Local Government Finance in Nigeria: A Case Study of Iwo Local Government Area of Osun State</i>	Kualitatif dianalisis dengan statistik deskriptif	- Sumber pendapatan utama pada pemerintah lokal Nigeria untuk mendanai seluruh belanja modal adalah dana transfer dari pemerintah federal (<i>Statutory Federal Allocation</i>) sehingga sumber pendapatan internal perlu dimaksimalkan.
2	Syam & Zulfikar (2022)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana	Deskriptif kualitatif	- Rata-rata rasio keuangan pada Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut: (i) rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, (ii) rasio ketergantungan keuangan 95,67%, (iii) rasio desentralisasi fiskal 3,67%, (iv) rasio efektivitas pengelolaan PAD 111,54%, (v) IPM 63,63% sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah.
3	Ardiansyah (2023)	Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Deskriptif kuantitatif	- PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah - Dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah - PAD dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

<i>No</i>	<i>Penulis (Tahun)</i>	<i>Judul</i>	<i>Teknik Analisis</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
4	Fahriza & Riswati (2023)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kualitatif dengan metode deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisis rasio terhadap PAD Kabupaten Bandung Barat selama empat tahun terakhir adalah (i) derajat desentralisasi menunjukkan hasil yang kurang baik, dengan rasio sebesar 18,07%, (ii) rasio ketergantungan keuangan daerah 75,36%, (iii) rasio kemandirian keuangan daerah 23,95% atau memiliki pola hubungan instruktif, (iv) rasio efektivitas PAD 99,98%.
5	Kushariyadi (2023)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 adalah sebesar 13,35 dengan kriteria kemandirian keuangan rendah sekali. - Pola hubungan kemandirian keuangan adalah pola hubungan instruktif, yang berarti dominasi pendanaan daerah berasal dari pemerintah pusat.
6	Suryahadi & Santosa (2024)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2018-2022.	Deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - 23 pemerintah daerah di Jawa Tengah memiliki rasio kemandirian keuangan dengan kategori rendah sekali atau dibawah 25%. - Perlu dilakukan pengembangan pada beberapa sektor seperti agrowisata, agroindustri, dan bioteknologi untuk mengurangi dominasi pada sektor pertanian. - Perlu diidentifikasi potensi SDM, penguatan UMKM, kerjasama dengan pihak swasta untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi.

<i>No</i>	<i>Penulis (Tahun)</i>	<i>Judul</i>	<i>Teknik Analisis</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
7	Yudia et al. (2024)	Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan rata-rata PAD Kota Magelang pada tahun 2017-2021 adalah sebesar 7,72%. - Urutan kontributor terbesar dalam PAD di Kota Magelang adalah (i) lain-lain PAD yang sah sebesar 81,33%, (ii) pajak daerah sebesar 13,23%, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,19%, (iv) retribusi daerah sebesar 2,25%. - Rasio kemandirian keuangan rendah, yaitu sebesar 41,97%, atau berada pada pola hubungan konsultatif - Rata-rata nilai IPM tergolong tinggi dengan sebesar 78,67%, walaupun mengalami perlambatan kenaikan.
8	(Tejaarief & Husni, 2025)	<i>A Study On How The Regional Financial Independence Ratio Supports Regional Autonomy In Serang City</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio kemandirian keuangan Kota Serang selama periode 2021–2023 masih berada pada tingkat rendah, yaitu sebesar 35,04%. - Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Serang masih bergantung pada kontribusi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

3. Metode Penelitian

Penelitian Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Prihardana (2024) metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi (*to describe and explore*); untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*); untuk menemukan dan mengembangkan (*to discover and generate*). Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian kedalam kata-kata, tulisan

dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah untuk menggali pemahaman tentang fenomena yang dialami subyek penelitian yang berupa motivasi, perspektif, perilaku, tindakan, dan lain-lain secara holistik (Moleong, 2016). Pemaknaan atau interpretasi dengan metode penelitian kualitatif dilakukan terhadap beragam data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi mendalam tentang berbagai fenomena yang diteliti (Neuman, 2017). Metode penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang masih sangat rendah, dan mencari strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Nazir dalam Irfina (2023) pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang diterapkan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga terdapat korelasi antara pemilihan metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin diteliti. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara/*interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dengan sumber data penelitian. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara lisan dengan tanya jawab/dialog Djumhur & Surya dalam Sari (2020). Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan wawancara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari informan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011), *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel sumber data penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu. Berikut adalah daftar informan penelitian tentang Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung:

Tabel 5. Informan Penelitian

<i>No</i>	<i>Informan</i>
1.	Kepala BPKPAD
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan
3.	Kepala Bidang Penganggaran
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7.	Kepala Sub Bidang Penagihan
8.	Bendahara Penerimaan BPKPAD
9.	Dosen Universitas BPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Kriteria informan dengan metode *purposive sampling* yang diterapkan pada penelitian ini meliputi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan,

dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung serta akademisi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang keuangan daerah, khususnya terkait strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kriteria informan yang ditetapkan pada pegawai BPKPAD Kabupaten Temanggung adalah (i) informan merupakan pegawai BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah) Kabupaten Temanggung (ii) informan menduduki jabatan pada bidang yang relevan dengan topik penelitian yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan (iii) informan telah menjabat minimal selama 1 (satu) tahun.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Kepala BPKPAD yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kemandirian keuangan daerah, serta kepala bidang dan staf teknis yang sesuai dengan kriteria penelitian. BPKPAD Kabupaten Temanggung terdiri dari 6 (enam) bidang yang mendukung kinerja Kepala Badan. Semua bidang tersebut memenuhi kriteria yang relevan dengan topik penelitian, namun salah satu kepala bidang belum memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam jabatannya, oleh karena itu, posisi tersebut akan digantikan dengan kepala sub bidang yang sesuai dengan kriteria *purposive sampling*. Selain kepala bidang dan kepala sub bidang, penelitian ini juga akan melibatkan satu staf teknis, yaitu bendahara penerimaan BPKPAD yang mengelola data pendapatan seluruh Kabupaten Temanggung.

Sementara itu, penentuan informan akademisi yang dipilih harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, atau administrasi publik serta memahami regulasi dan kebijakan yang mengatur keuangan daerah. Semua informan harus memahami konteks lokal Kabupaten Temanggung, bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam, serta dapat diakses untuk keperluan wawancara atau diskusi lebih lanjut.

Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi mendalam terkait strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Temanggung. Pertanyaan wawancara dirancang berdasarkan fokus penelitian yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung maupun dari akademisi yang memiliki keahlian di bidang keuangan daerah. Wawancara dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum untuk membangun pemahaman konteks, kemudian berlanjut pada pertanyaan inti yang bersifat terbuka untuk memungkinkan penggalian informasi secara rinci dan mendalam. Panduan pertanyaan wawancara terkait dengan strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. Daftar Pertanyaan Wawancara

<i>No</i>	<i>Pertanyaan Wawancara</i>
1.	Bagaimana pandangan Saudara tentang konsep kemandirian keuangan daerah?
2.	Menurut Saudara, bagaimana kondisi kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini, dan apakah kemandirian keuangan daerah tersebut sudah dapat dianggap ideal?
3.	Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Temanggung?
4.	Strategi apa saja yang menurut Saudara dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah?

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

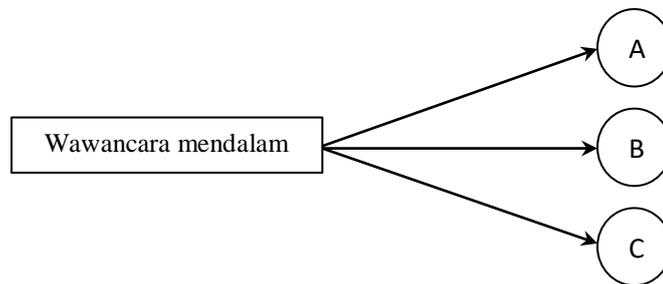
Sumber data sekunder yang berperan sebagai pendukung penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terdahulu yang relevan dengan penelitian, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2023.

3.2 Prosedur Perekaman Data

Prosedur perekaman data penelitian dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa alat, yaitu perekam suara, kamera untuk dokumentasi visual, dan komputer untuk merekam wawancara dalam format teks.

3.3 Uji Validitas Instrumen Penelitian

Teknik pengujian keabsahan data instrument penelitian menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian dengan menguji keabsahan data melalui beberapa sudut pandang yang berbeda (Sinta, 2024). Triangulasi sumber diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti dapat mengkonfirmasi pada informan dengan menggunakan satu teknik, yaitu wawancara. Pertanyaan wawancara yang sama diberikan kepada informan penelitian, agar memperoleh data yang konsisten. Dengan mengajukan pertanyaan yang sama, risiko bias dari peneliti juga diminimalkan, karena semua informan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab. Jika banyak informan memberikan jawaban yang serupa, ini dapat menambah validitas temuan, sedangkan perbedaan jawaban bisa menjadi bahan eksplorasi lebih lanjut.



Gambar 1. Triangulasi Sumber
Sumber: Sugiyono (2020)

3.4 Prosedur Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk data yang tidak bisa diukur menggunakan statistik maupun diukur dalam bentuk angka, seperti wawancara, observasi, teks, dan lain sebagainya. Teknik ini berfokus pada kualitas pengelolaan data non numerik. Kualitas data yang diperoleh semakin baik jika penjelasan yang diberikan terhadap data tersebut semakin kompleks dan rinci. Dalam analisis data model Miles dan Huberman terhadap data penelitian kualitatif, terdapat beberapa aktivitas untuk menganalisa data, yaitu aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi Sugiyono dalam Rohmah (2024).

Hasil dari aktivitas pengumpulan data hasil rekaman suara informan saat wawancara diolah menggunakan alat yang bisa merubah rekaman suara wawancara menjadi transkrip dalam bentuk teks, yaitu melalui www.aurisai.io dan <https://salyns.prosa.ai/> yang merupakan pengolah data kualitatif *online*. Transkrip wawancara tersebut kemudian dimasukkan ke aplikasi perangkat lunak analisis data kualitatif NVivo 12 Pro. NVivo adalah singkatan dari NUD*IST dan Vivo. NUD*IST (*Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing*) adalah perangkat lunak (*software*) untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen proyek analisis data kualitatif. NVivo diambil dari in-vivo, istilah dari pakar penelitian *grounded theory*, Strauss dan Glasser, yang berarti melakukan koding berdasarkan data yang nyata, hidup, dialami partisipan di lapangan (Endah et al., 2020). NVivo 12 Pro digunakan untuk menganalisis dan mengorganisir data penelitian tidak terstruktur sehingga dapat membantu untuk menemukan pola dan wawasan yang mendalam dari data penelitian yang diperoleh.

Pada tahun 2014 dilakukan revisi dalam analisis interaktif data kualitatif oleh Miles dan Huberman, perubahan tersebut adalah data reduksi menjadi data *condensation*, yang menyatakan bahwa “*data condensation refer to the process of selecting, focusing, simplifying, abstarcting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of writen-up field notes, interview transcripts, document, and other empirical material. By condensing we’re making data stronger* (Miles et al., 2014). Kondensasi data adalah alur dari pemilihan, fokus, penyederhanaan, pembuatan abstrak data dengan pengumpulan data di lapangan yang diperoleh peneliti, wawancara, transkrip dan berbagai catatan serta

